

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH
DALAM MENUNJANG OPTIMALISASI ASET DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

ABSTRAK

**Oleh :
Nur Agustin**

**Dosen Pembimbing :
Lina Nasihatun Nafidah, SE., M. Aks**

Dengan berlakunya peraturan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong pendanaan atas penyerahan dalam urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengatur sumber daya yang dimiliki dengan cara melakukan pengelolaan aset yang baik. Dari berita radar jombang pengelolaan aset daerah Kabupaten Jombang belum maksimal. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui proses pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Apakah sudah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 dan dalam menunjang optimalisasi aset daerah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi. Sumber data yang digunakan adalah primer, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi serta sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah semua dilaksanakan dengan dari mulai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi aset daerah yang dilakukan di BPKAD sudah optimal, namun masih ada kendala yaitu kurang aktifnya SKPD dalam melaporkan jumlah aset yang dimiliki sehingga BPKAD selaku penatausahaan barang tidak mengetahui jika ada aset daerah yang belum digunakan secara optimal. Agar penggunaan aset daerah bisa optimal maka BPKAD melakukan optimalisasi melalui pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa sewa dan pinjam pakai.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Optimalisasi Aset Daerah.

**REGIONAL ASSET MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN SUPPORTING
REGIONAL ASSET OPTIMIZATION IN THE FINANCIAL AND ASSET
MANAGEMENT AGENCY OF JOMBANG REGENCY**

ABSTRACT

**By :
Nur Agustin**

**Supervisor :
Lina Nasihatun Nafidah, SE., M. Aks**

With the enactment of the regulation of Law No. 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Governments to encourage funding on handover in regional government affairs. Local governments are given greater authority in managing their resources by means of good asset management. From the news of Jombang Radar, the asset management of the Jombang Regency is not optimal. Therefore the researcher wants to know the process of regional asset management in the Regional Financial and Asset Management Agency of Jombang Regency. Is it in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 and in supporting the optimization of regional assets. This research uses descriptive qualitative method. The data source used is primary, namely observation, interview, and documentary as well as secondary in the form of documents obtained from the research locatio.

The results of this study indicate that the Accountability Management of Regional Assets / Assets carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of Jombang Regency has performed optimally and in accordance with the system and procedure for the management of regional property cycles as regulated in Permendagri No 19 of 2016 concerning Management Technical Guidelines Regional Property which has all been carried out starting from the planning of needs and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, assessment, management, annihilation, deletion, administration, and fostering supervision and control. The optimization of regional assets carried out at BPKAD has been optimal, but there are still obstacles namely the lack of active SKPD in reporting the number of assets owned so that BPKAD as the administration of goods does not know if there are regional assets that have not been used optimally. In order to optimize the use of regional assets, BPKAD optimizes through the use of regional assets / assets in the form of leases and loans.

Keywords: Accountability, Management of Regional Property, and Optimization of Regional Assets.